

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Batam

1. Letak Geografis Kota Batam

Gambar 2.1 Peta Kota Batam



Sumber: Gowest.ID (2018)

Kota Batam jika dilihat melalui geografis merupakan daerah yang sangat strategis, yaitu bersinggungan langsung dengan jalur pelayaran dunia internasional. Sesuai dengan Perda tentang Rencana Ruang, Kota Batam terletak di $0^{\circ}25' 29''$ LU - $1^{\circ}15'00''$ LU - $103^{\circ}34' 35''$ BT - $104^{\circ}26'04''$ BT.

Dilihat dari RTRW Kota Batam dari tahun 2004 hingga 2014, Kota Batam memiliki luas wilayah seluas 3.990,00 Km² yang terdiri dari luas daratan seluas 1.030 Km² dan luas wilayah laut seluas 2.950 km². Kota

Batam sendiri merupakan Kota dengan jumlah pulau yang sangat banyak yaitu meliputi 400 pulau, dan telah memiliki nama sebanyak 329.

- Utara : Selat Singapura
- Selatan : Kecamatan Senayang
- Barat : Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun
- Timur : Kecamatan Bintan Utara

Kota Batam setelah terjadinya pemekaran wilayah terbagi menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1. Nama Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
1.	Belakang Padang		69120
		1. Pulau Terong	5791
		2. Pecong	1382
		3. Kasu	50637
		4. Pemping	4249
		5. Tanjung Sari	2041
		6. Sekanak Raya	5020
2	Bulang		158753
		1. Pantai Gelam	25853
		2. Temoyong	5351
		3. Pulau Setokok	24886
		4. Batu Legong	49775
		5. Bulang Lintang	50697
		6. Pulau Buluh	2187
3	Galang		350764
		1. Pulau Abang	28612
		2. Karas	50449
		3. Sijantung	39610
		4. Sembulang	65834
		5. Rempang Cate	91523
		6. Subang Mas	20254
		7. Galang Baru	50287
		8. Air Raja	4191
4	Sei Beduk		106447

		1. Tanjung Piayu	28595
		2. Duriangkang	11273
		3. Mangsang	9999
		4. Mukakuning	56581
5	Nongsa		114546
		1. Ngenang	19546
		2. Kabil	25915
		3. Batu Besar	41009
		4. Sambau	28074
6	Sekupang		68302
		1. Tanjung Riau	23902
		2. Tiban Baru	3886
		3. Tiban Lama	14094
		4. Tiban Indah	5936
		5. Patam Lestari	6159
		6. Sungai Harapan	3325
		7. Tanjung Pinggir	10999
7	Lubuk Baja		11426
		1. Batu Selicin	1331
		2. Lubuk Baja Kota	1459
		3. Kampung Pelita	1393
		4. Baloi Indah	3519
		5. Tanjung Uma	3724
8	Batu Ampar		11187
		1. Tanjung Sengkuang	3787
		2. Sungai Jodoh	2161
		3. Batu Merah	3792
		4. Kampung Seraya	1447
9	Batam Kota		38964
		1. Teluk Tering	5890
		2. Taman Baloi	4065
		3. Sukajadi	3374
		4. Belian	17683
		5. Sungai Panas	2991
		6. Baloi Permai	4960
10	Sagulung		54780
		1. Tembesi	30512
		2. Sungai Binti	5356
		3. Sungai Lekop	3723
		4. Sagulung Kota	1933
		5. Sungai Langkai	3983
		6. Sungai Pelunggut	9271
11	Batu Aji		41337
		1. Bukit Tempayan	1738
No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
		2. Buliang	2789
		3. Kibing	14535
		4. Tanjung Uncang	22274
12	Bengkong		13214
		1. Bengkong Laut	1829
		2. Bengkong Indah	1999
		3. Sadai	6326
		4. Tanjung Buntung	4060

Sumber: BPS 2015 (diolah).

Wilayah yang berada di kota Batam termasuk kecamatan lainnya dan yang ada di dalam Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil dari erosi yang tersebar dari semenanjung Malaysia / pulau Singapore di bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro hingga ke Selatan dari Karimun.

Kota Tanjung Pinang yang merupakan pusat pemerintahan dari Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Kabupaten Bintan memiliki kedekatan emosional dan kulutral yang sangat dekat dengan Kota Batam. Pada dasarnya Kota Batam memiliki permukaan tanah yang datar dan memiliki variasi perbukitan dengan tinggi maksimum 160 meter di atas permukaan laut. Kota Batam juga memiliki sungai-sungai kecil yang terdiri sebanyak 22 sungai kecil yang mengalir dengan air pelan dan dikelilingi hutan-hutan yang sangat lebat.

Penduduk di Kota Batam kurang lebih hampir sama seperti yang ada di Kota atau Kabupaten yang ada. Setelah Batam terbentuk menjadi Kotamadya, saat ini pengembangan Kota Batam sangat pesat di bidang Industri, Perdagangan, Alih Kapal dan Pariwisata.

Laju penduduk di kota Batam selalu meningkat setiap tahunnya dimana hasil dari sensus penduduk selama periode tahun 2000 hingga tahun 2010 Kota Batam memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk sekitar 8,1 persen. Berdasarkan BPS, tercatat penduduk pada tahun 2016 sebesar 1.236.399 jiwa yang terdiri dari 631.338 jiwa laki-laki dan 605.061 jiwa perempuan dengan sex ratio 104,34. Hanya saja yang terjadi di Kota Batam

adanya persebaran penduduk yang tidak merata hingga mengakibatkan penumpukan/kepadatan penduduk di wilayahnya yang bervariasi.

Tabel 2.2. Penduduk Kota Batam berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan pada tahun 2011-2016

No	Kecamatan	Penduduk Kota Batam (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belakang Padang	9 673	9 556	19 229
2	Bulang	5 246	4 678	9 924
3	Galang	8 412	7 311	15 723
4	Sungai Beduk	37 185	49 506	86 691
5	Sagulung	43 048	43 145	86 193
6	Nongsa	131 131	111 224	242 355
7	Batam Kota	90 564	82 915	173 479
8	Sekupang	33 362	29 771	63 133
9	Batu Aji	33 983	31 352	65 335
10	Lubuk Baja	121 954	121 998	243 952
11	Batu Ampar	63 757	60 408	124 165
12	Bengkong	53 023	53 197	106 220
Kota Batam		631 338	605 061	1 236 399

Sumber: BPS 2011-2016 (data diolah).

2. Sejarah Kota Batam

Kotamadya Batam sebelum menjadi daerah otonom merupakan Kotamadya ke 2 (dua) di Provinsi Riau sedangkan yang pertama adalah Kotamadya Pekanbaru. Kota Batam memiliki kedudukan yang setara/setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Tingkat II lainnya. Sebelumnya Kota Batam adalah sebuah wilayah yang berbentuk Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang terdapat di dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam sendiri

merupakan sebuah nama yang berada di pulau besar namun nama ini tidak jelas diketahui dari mana literature sejarahnya di masa lampau ketika Johor dan Riau masih berbentuk Kerajaan Melayu.

Abad ke 18, Lord Minto dan Rafles yang merupakan utusan dari pemerintahan kerajaan Inggris menyepakati “Barter” dengan Pemerintah Hindia Belanda sehingga pulau Batam yang sebenarnya kembar dengan Singapura menjadi terpisah. Tanggal 18 Desember 1829 Pemerintah Belanda yang menjabat sebagai Residen Riau dengan nama Sultan Abdul Rahmansyah YTM (Yang Dipertuan Muda) memerintah Raja Isa memimpin pemerintahan atas daerah Nongsa dan Rantau dari hasil taklukannya. Dengan adanya peristiwa tersebutlah dianggap sebagai Hari Jadi Kota Batam yang dimaklumkan oleh Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 pada tanggal 23 Juli 2009.

Dahulunya Kota Batam memiliki luas wilayah yang lebih kurang 1.647,83 Km², yang terdiri dari lautan seluas 1.035,30 Km² dan daratan seluas 612,53 Km², pulau-pulau di Kota Batam pada saat itu terhitung sebanyak 186 pulau yang 80 diantaranya telah dihuni dan sisanya merupakan pulau yang tidak dihuni sama sekali, setidaknya ada 3 pulau besar yaitu Pulau Batam dengan luas kurang lebih 415 Km², Pulau Bulan dan Pulau Jeri. Karena letak Kota Batam berada pada garis perdagangan Internasional dan berada di 12,5 mil laut dari Singapura maka pintu keluar dan masuk dilalui melewati pelabuhan laut Sekupang.

Bermodalkan hal ini pemerintah Indonesia melakukan upaya agar adanya pengembangan di wilayah ini khususnya di bidang ekonomi untuk

menyambut persiapan tinggal landas pada Pelita VI (program Pemerintah saat itu), maka pemerintah Indonesia mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OBDIPB). Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OBDIPB) dilakukan untuk memacu pengembangan pulau Batam menjadi daerah perdagangan dan Industri, pergudangan, alih kapal dan basic logistic juga pariwisata yang dimaklumkan dengan Surat Keputusan Presiden dan juga Dirjen, perodesasi pengembangan kawasan pulau Batam dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 1969 – 1975

Pada masa ini Batam dikembangkan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai, pada saat itu Otorita Batam dipimpin oleh Dr. Ibnu Sutowo, diantara itu telah keluar beberapa Keputusan Presiden antara lain:

- a. Kepres No. 65 Tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970; Tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam.
- b. Kepres No. 74 Tahun 1971 tanggal 26 Oktober 1971; Tentang Pembangunan Pulau Batam dengan membentuk Badan Pimpinan Daerah Industri (Badan Penguasa) dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- c. Kepres No. 41 tahun 1973 tanggal 22 November 1973; menyatakan sebagai daerah industri.

pada tanggal 26 Agustus 1974 pemerintah Indonesia memutuskan lokasi di Sekupang, Batu Ampar dan Kabil sebagai Bonded Ware House dan menunjuk PT. Persero Batam sebagai penguasa Bonded Ware House.

2. Tahun 1975 – 1978

Pada masa ini Otorita Batam dengan diketuai oleh Prof Dr. Soemarin melakukan konsolidasi dan pemeliharaan sarana dan juga prasarana oleh aset-aset yang ada. Di masa ini keluar beberapa keputusan yaitu:

- a. Perpindahan tanggung jawab pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dari Pertamina ke tangan Pemerintah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 tahun 1977 tentang Pengolahan dan Penggunaan Tanah di Pulau Batam.
- c. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 147/Kpb/V/1977,
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 150/LML/1977
- e. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.119/0/Phb/1977.
- f. Surat Keputusan Ketua BKPM No. 1 Tahun 1978 yang memutuskan Pemberian Perlimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian Pemohonan Penanaman Modal di Pulau Batam.
- g. Pada tanggal 24 November 1978 pemerintah menetapkan seluruh wilayah dari Pulau Batam adalah wilayah Bonded Ware House.

3. Tahun 1978 – 1983

Pada periode ini pemantapan rencana dan lanjutan pembangunan prasarana utama dengan ketua Otorita Batam Prof. DR. Ing. BJ. Habibie. Periode ini rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategi pengembangan, strategi pembangunan nasional dan situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi. Beberapa surat keputusan yang dikeluarkan dalam periode ini antara lain: a. Kepres No. 194/M/1978 tanggal 29 Agustus

1978 tentang pengangkatan Prof. DR.Ing. B J. Habibie sebagai ketua Otorita Batam dan Mayjend. TNI Soedarsono D. sebagai ketua Badan Pelaksana. b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PW-10-01-83 tanggal 7 Juni 1980 tentang penetapan Pulau Batam sebagai daerah berstatus khusus di bidang keimigrasian. c. Keputusan Menteri Perdagangan dan koperasi No.70/KP/I/1983 tanggal 19 Januari 1983 tentang pelimpahan wewenang di bidang perdagangan dan koperasi. d. KEPRES No. 15 tahun 1983 tanggal 9 Maret 1983 tentang kebijaksanaan pengembangan pariwisata, dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri.

4. Tahun 1983 sampai sekarang

Pada periode ini dilakukan penanaman modal dan industri serta pengembangannya. Tanggal 27 Desember 1983 diresmikan oleh Bapak Presiden RI prasarana- prasarana utama, sejak periode tersebut daerah industri Pulau Batam mulai dipasarkan secara luas dan secara nyata sudah menunjukkan pengembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 menetapkan semua wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-moi sebagai Bonded Area.

Sejalan dengan perkembangan Pulau Batam tersebut oleh Otorita Batam, sesuai dengan perodesasi pembangunan dan pimpinannya maka dibentuklah "KOTAMADYA BATAM' berdasarkan PP No. 34 tahun 1983,

dalam hal ini wilayah pemerintahannya sama dengan Kecamatan Batam sebelum dibentuknya Kotamadya Batam tersebut dan membawahi 3 (tiga) kecamatan yaitu: Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur. Tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai penjabaran dari pasal; 17 PP No. 34 tahun 1983, telah keluar KEPRES No. 7 tahun 1984 tentang: hubungan kerja antara Kota-madya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam KEPRES No. 7 tahun 1984 tersebut telah diatur tentang koordinasi sebagai berikut:

Pasal 2, menyebutkan: Walikotamadya Batam, sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintahan membina kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di semua bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam.

Pasal 3 huruf F, menyebutkan: Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya, guna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka dan sejauh mana mengenai pelaksanaan pembangunan, sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam hal ini telah ditunjuk sebagai Walikotamadya Batam yang pertama Ir. Rahman Draman yang menjabat sebagai walikota selama periode 1984-1989. Pada Oktober tahun 1989 ditunjuk Walikota Madya Batam yang kedua Drs. R. A. Aziz yang menjabat sampai dengan tahun 1999.

5. Tahun 1992

Dengan Kepres No. 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah BARELANG (Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 Km (115 % dari luas Singapura).

6. Tahun 1998

Tahun ini merupakan periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Sebagai ketua dijabat oleh Ismeth Abdullah.

7. Tahun 1999 (Otonomi Daerah)

Implementasi Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2000, maka Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi daerah otonom Kota Batam, yang mempunyai kewenangan terhadap 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sama seperti daerah otonom lainnya di Indonesia. Untuk itu, struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, dinyatakan

bahwa Kota Batam semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berubah menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk sehingga menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

8. Tahun 2007 (Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas).

Sejak diterbitkan UU 44 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, era baru dalam pengelolaan pertumbuhan ekonomi makin bebas dan terbuka. Implementasi UU ini melalui PP 46 tahun 2007 sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.. Dengan dijadikannya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diharapkan dapat meningkatkan investasi, menambah keunggulan kompetitif produk ekspor, peningkatan penerimaan devisa, membuka lapangan kerja serta mengurangi jumlah pengangguran di Kota Batam.

3. Visi dan Misi Kota Batam

a. Visi

“Terwujudnya Batam menuju Bandar Dunia yang Madani dan Menjadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional”

1. Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang dengan pesat dimasa mendatang yaitu Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak dan posisi yang strategis maupun daya dukung yang merupakan salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia.
2. Bandar dunia bermakna pengembangan dan pembangunan Kota Batam diarahkan sebagai Kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis domestik dan manca negara. Dalam jangka panjang, pengembangan Kota Batam diupayakan menjadi sebuah kota jasa yang merupakan “*center of excellent*”, dengan lebih melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi awal kewilayahan, sebagai sebuah kota dagang, Kota pariwisata dan Kota alih kapal serta Kota industri yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.
3. Madani dalam pengertiannya merupakan masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*), dimana masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan baik yang rumit maupun yang mudah selalu dihadapi dengan sopan santun dan beradab serta dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah.
4. Pilar / tiang pranata yang harus dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat madani adalah meliputi peranan ulama atau ahli ilmu yang

konsisten, umaroh yang mengemban kepemimpinan, pelaku perekonomian masyarakat, pekerja dan rakyat yang loyal.

5. Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional artinya Kota Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bertumpu pada keunggulan *comparative* sebagai kota perdagangan dan jasa, hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional.
6. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional nantinya, diharapkan Kota Batam akan memiliki masyarakat yang sejahtera kehidupannya, sumber daya manusia dan generasi muda yang cerdas dan sehat, berbudaya, agamis, berakhlak mulia yang mampu menghadapi kemajuan zaman dan era globalisasi.

b. Misi

1. Mengembangkan Kota Batam sebagai Kota pusat kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dan alih kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam suatu sistem tata ruang terpadu yang didukung oleh infrastruktur, sistem transportasi, sistem Teknologi Informasi (IT) dan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan investasi yang didukung oleh iklim / situasi usaha yang kondusif berlandaskan supremasi hukum

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat hinterland dan masyarakat miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan masalah sosial
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olahraga
5. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya Melayu dan budaya daerah lainnya serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berbudi pekerti
6. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik.

4. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.

a. Visi

Terwujudnya peningkatan investasi dan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien guna mendukung percepatan pembangunan dan ekonomi Kota Batam.

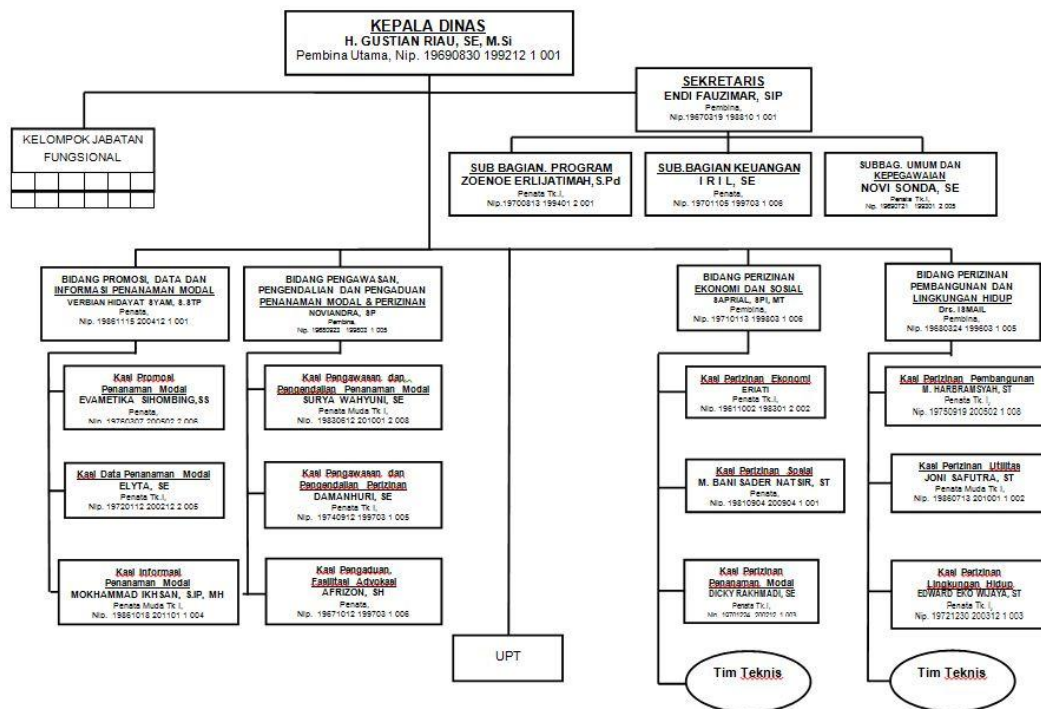
b. Misi :

1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.
2. Meningkatkan kegiatan promosi yang lebih profesional.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi.

4. Meningkatkan hubungan kerjasama investasi dalam maupun luar negeri.
 5. Meningkatkan sistem pelayanan perizinan investasi efektif, efisien dan transparan.
 6. Mewujudkan sistem informasi investasi yang berbasis teknologi.
 7. Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pendukung investasi dan pelayanan perizinan.
 8. Mewujudkan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan yang efektif dan efisien.
- c. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.**

Bagan 2.2

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.



Sumber: (Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam, 2017)

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain.

a. Tugas

Melaksanakan, mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

- Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

- Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang data dan informasi investasi, bidang pengawasan dan pengaduan, bidang perizinan ekonomi dan sosial, bidang perizinan pembangunan dan lingkungan hidup;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;